

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum: (a) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori baik; (b) kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori tinggi; (c) akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori baik.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sistem pengendalian intern memiliki kontribusi pengaruh sebesar 0,6990 atau 69,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh sebesar 69,90% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 30,10% % dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya sistem pengendalian intern yaitu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh sebesar 0,641 atau 64,10%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan berpengaruh sebesar 64,10% terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan sisanya sebesar 35,90% dipengaruhi oleh faktor lain. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Secara langsung, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sementara secara tidak langsung, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan melalui mediasi kualitas laporan keuangan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut diatas, maka untuk meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan, berikut ini penulis mengajukan beberapa saran.

1. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) khususnya inspektorat perlu melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern yang berjalan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten. Selain pemantauan, inspektorat juga perlu melakukan audit, reviu, evaluasi, kegiatan

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Inspektorat sebagai auditor intern pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk melakukan revidu keuangan harus berusaha mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan dengan memberikan pengarahan serta pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dan penerapan sistem pengendalian intern. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan tidak muncul lagi opini *disclaimer* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi peneliti yang lain, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan dengan tambahan responden penelitian serta dengan unit analisis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).